

---

## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Mario Andrias Kiton

STMB MULTI SMART

Jalan Pajak Rambe, Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20252

Email : mario\_kitan05@yahoo.co.id

---

### Abstrak

Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Provinsi Sumatera Utara telah memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Disisi yang lain beberapa kendala ekonomi yang timbul antar daerah baik sumber daya manusia dan sumber daya modal menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian antar kabupaten/kota, bahkan angka ketimpangan (Indeks Williamson) meningkat tinggi dalam dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi dan dana perimbangan yang masuk ke daerah, serta angkatan kerja dan aglomerasi di daerah tersebut menurunkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *panel* dari 33 kabupaten/kota selama periode 2006 hingga 2015. Metode penelitian empiris ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif menggunakan estimasi model efek tetap (*Fixed Effect Model*) untuk melihat hubungan variabel bebas pada ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan: (i) bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan. (ii) bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan. (iii) bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, (iv) bahwa variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, (v) dari hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi yang diteliti benar dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15 persen, sedangkan 12.85 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (yang tidak diteliti).

**Kata Kunci :** Investasi, Angkatan Kerja, Dana Perimbangan, Aglomerasi, Indeks Williamson, Ketimpangan, Fixed Effect Model, Regresi Linier Berganda.

---

### 1. LATAR BELAKANG

Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecil kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain dari menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula dapat mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Propinsi Sumatera Utara telah memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil meningkatkan jumlah PDRB, dari 139.618.310.000 rupiah pada tahun 2005, menjadi 410.195.390.800 rupiah pada tahun 2015. Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan juga menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari 1,97 juta atau 15,66 persen pada tahun 2006 turun menjadi 1.5 juta atau 10,79 persen pada tahun 2015.

Daerah-daerah yang potensial dan lebih sejahtera yang dapat dilihat sebagai keuntungan komperatif di dalam wilayah, tetapi di sisi yang lain beberapa kendala ekonomi seperti sumber daya manusia dan sumber daya modal yang seharusnya sebagai keuntungan selalu dihadapkan oleh pengambil keputusan baik di tingkat propinsi ataupun kabupaten/kota yang tidak baik. Sebagai akibatnya kondisi umum ekonomi dalam distribusi pendapatan tidak tercapai, dan tetap menunjukkan kelemahan termasuk ketimpangan dalam pencapaian ekonomi antar kabupaten/kota (Yusuf, 2013). Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2000-2010 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010, Indeks Williamson untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,7148 jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar 0,5749. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Posisi suatu kabupaten/kota dalam Tipologi Klassen selain bergantung dari kinerja pembangunan kabupaten/kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan kabupaten/kota lainnya.

Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita keseluruhan kabupaten/kota di wilayah yang menjadi acuan.

Memperhatikan data pergeseran Tipologi Klassen di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 - 2010, ada sejumlah kabupaten yang tidak mengalami perbaikan pembangunan dalam dasawarsa terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan oleh sejumlah kota yang meningkat sehingga berada di posisi 2 atau 3 dalam Tipologi Klassen. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa ada terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Memperhatikan komposisi sesuai dengan pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara**”. Bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Indonesia semakin melebar. Daerah Sumatera Utara dipilih sebagai daerah atau objek penelitian adalah karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh angkatan kerja, investasi, alokasi dana perimbangan, dan faktor aglomerasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari 2006 – 2015.

## 2. LANDASAN TEORI

Sumitro Djojohadikusumo (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irwan dan M. Suparmoko, 1988). Di negara berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap penduduk/lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Lincoln Arsyad, 1999).

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi daerah ditekankan kepada pengaruh perbedaan kataristik ruang (*space*) terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tidak meninggalkan penekanan kepada unsur waktu yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan hal ini, maka faktor faktor yang menjadi perhatian juga berbeda dengan apa yang lazim dibahas pada pertumbuhan ekonomi nasional (*growth theory*). Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Akan tetapi pada teori pertumbuhan ekonomi regional, faktor faktor yang mendapat perhatian utama adalah anatara lain keuntungan lokasi, aglomerasi, migrasi, arus lalu lintas barang/jasa dan faktor produksi antar daerah.

Thee Kian Wie, (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dapat dibagi atas: Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution income*); Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*); Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*); Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern.

Williamson menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah bahwa pada saat pendapatan perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Implikasi yang dapat diturunkan bahwa ketimpangan pendapatan antar regional merupakan konsekuensi dari pembangunan dan akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan kedewasaan pembangunan itu sendiri. Menurut Myrdal (Sukirno, 2007) dalam jangka panjang pendapatan perkapita antar

daerah cenderung timpang. Perbedaan tersebut menurutnya disebabkan adanya dua faktor yaitu backwash effect dan spread effect. Pembangunan ekonomi antar wilayah akan menimbulkan adanya backwash effect yang mendominasi spread effect dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium. Spread effect adalah kekuatan yang menuju konvergensi antara daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin. Dengan bertumbuhnya daerah kaya, maka bertambah pula permintaannya terhadap produk dari daerah yang tertinggal seperti hasil pertanian dan hasil industri barang konsumsi, dengan demikian akan yang menimbulkan pertumbuhan. Kurang mampunya daerah terbelakang berkembang secepat daerah yang maju disebabkan karena keadaan backwash effect, yang menyebabkan daerah terbelakang menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya. Dari masa ke masa daerah yang lebih maju akan menjadi daya penarik bagi penduduk daerah terbelakang, untuk mengadakan migrasi karena adanya keyakinan untuk mendapatkan gaji yang lebih baik/ prasarana sosial yang lebih baik di daerah yang lebih maju. Pada umumnya yang melakukan migrasi adalah kaum muda, berpendidikan dan berpengalaman cukup dan dengan demikian yang tertinggal di daerah terbelakang adalah golongan penduduk yang tingkat kecakapan maupun produktivitas rendah sehingga menyebabkan potensi yang lebih terbatas dalam menggalakkan pembangunan.

Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas - prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal, 1983:17). Dalam hal pemerataan, Rahman berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipertimbangkan melalui pelaksanaan switching policy. Bila menurut analisa alokasi anggaran perlu lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju. Dengan demikian unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara sekaligus. Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar (1947). Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasikan hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Investasi yang masuk baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 1982).

Disisi lain untuk menarik investasi masuk, pemerintah daerah setempat harus berupaya untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, daerah dengan sarana dan prasarana lebih baik. Pembangunan ekonomi yang membutuhkan arus modal yang mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada daerah yang kurang berkembang untuk membangun sarana dan prasarananya. Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan oleh pemerintah, sementara Dana Alokasi Khusus merupakan spesifik grant yang dalam penggunaannya pemerintah pusat telah menetapkan tujuan penggunaannya, dan daerah penerima harus menyediakan dana pendamping sebesar 10% dari total pembiayaan. Daerah yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah yang lebih besar akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

Untuk menunjang pembangunan di perlukan juga angkatan kerja yang besar dan juga berkualitas. Penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa secara produktif. Arthus Okun (1926 – 1980) mengemukakan sebuah teori yang kemudian disebut Hukum Okun (Okun's law) yang berbunyi "rasio elastisitas dari nilai aktual penciptaan output yang potensial terhadap perubahan tingkat pekerja adalah sebesar 3 kali lipatannya", hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semangkin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Todaro (2000:112) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mamacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Todaro (2000:108) juga menyatakan, pertumbuhan penduduk yang cepat

mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat, cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah diperlukan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah). Pembangunan daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan mensekresikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan (Zuhri, 1998; Hartono, 2008).

Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Martin dan Ottaviano, 2001). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya *intermediate good* pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi. Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan mamfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, mamfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi. Myrdal dan Pred dalam (Kuncoro, 2002) berpendapat bahwa dampak positif dari kausalitas kumulatif disebut sebagai *agglomeration economies*, seperti terbentuknya industri baru, penciptaan kesempatan kerja lebih lanjut, peningkatan daya tarik kerja dan modal, peningkatan keterampilan penduduk, pengembangan industry terkait, perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya perunit yang lebih rendah, dan tersedianya jasa dan hiburan yang baik. Pada saat aglomerasi di suatu wilayah mampu mencapai skala ekonomis yang maksimum maka ekspansi setelah titik tersebut hanya akan menimbulkan dampak negative (*agglomeration diseconomies*) bagi wilayah aglomerasi. Adanya persaingan antar perusahaan dan industry lama kelamaan akan meningkatkan harga bahan baku dan faktor produksi sehingga biaya perunit naik yang menyebabkan relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimum. Munculnya aglomerasi disuatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi (Richardson dalam Sigalingging, 2008).

Menurut Sbergami (2002) proksi dari aglomerasi disebut sebagai Indeks Balassa (*Balassa Index*). Indeks balassa digunakan untuk menghitung aglomerasi, kekhurusan indeks ini adalah dapat digunakan untuk membedakan faktor spesialisasi eksport dimana disini diwakili oleh tenaga kerja. Pembilang dari indeks ini menyajikan bagian wilayah dari tenaga kerja di sector industry. Semakin terpusat suatu industry, semakin besar indeks balassanya. Aglomerasi dikatakan kuat bila indeks balassa diatas 4, rata-rata atau sedaan bila nilainya antara 2 dan 4, dan dikatakan kecil atau lemah bila nilainya antara 1 dan 2, sedangkan nilai 0 sampai dengan 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadi aglomerasi.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < VW < 1$ . Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safriyal, 1997).

Rumus Index Williamson yang digunakan adalah:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

$$VW = 0 < VW < 1$$

dimana  $Y_i$  = PDRB per kapita daerah  $i$  ;  
 $Y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah ;  
 $f_i$  = jumlah penduduk daerah  $i$  ;  
 $n$  = jumlah penduduk Sumatera Utara (daerah referensi).

### 3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini, yakni untuk menemukan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini penulis membatasi lokasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota di sekitar ibu kota Provinsi, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini memperhatikan tingginya tingkat ketimpangan yang dimiliki oleh Kota Medan dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lain di Provinsi Sumatera Utara yang menarik perhatian penulis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang bersumber dari data sekunder yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari data penduduk, data PDRB Provinsi Sumatera Utara, data PDRB per kabupaten/kota, data investasi swasta Provinsi Sumatera Utara, data angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara, data angkatan kerja per kabupaten/kota, dan data dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara. Penulis juga menggunakan data sekunder investasi yang diperoleh dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Adapun data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Variabel Investasi: Menggunakan data realisasi penanaman modal dalam negeri maupun asing di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2006 – 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
- Variabel Angkatan Kerja: Menggunakan data angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 – 2015 yang dinyatakan dalam satuan jiwa.
- Variabel Dana Perimbangan: Menggunakan data Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang tercatat dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
- Variabel Agglomerasi: menggunakan data hasil olah indeks balasa yang dilakukan oleh penulis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan statistik melalui analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen dalam hal ini Ketimpangan Pembangunan terhadap variabel bebas yakni Investasi (I), Angkatan kerja (AK), Dana perimbangan, dan aglomerasi di Provinsi Sumatera Utara. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk menestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi dan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005). Untuk alat bantu pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 7.0.

Memperhatikan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, maka untuk menguji hipotesis digunakan model Efek tetap dan Efek random (Greene, 2000).

Dalam menganalisis hubungan antara ketimpangan yang disebabkan oleh investasi swasta, angkatan kerja pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara alokasi dana perimbangan, dan faktor aglomerasi, maka digunakan data time series (Gujarati, 1995). Dengan model ini diharapkan akan diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi) yang berguna dalam perencanaan pembangunan. Dari keempat variabel tersebut dengan memperhatikan model pertumbuhan solow, dapat disusun suatu fungsi Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yang merupakan suatu persamaan linear berganda, yakni:

$$\ln(Vw_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(X_{1it}) + \alpha_2 \ln(X_{2it}) + \alpha_3 \ln(X_{3it}) + \alpha_4 \ln(X_{4it}) + \mu$$

- dimana :
- Vw = Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara.
  - X1 = Investasi Swasta di Provinsi Sumatera Utara.
  - X2 = Ratio Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara.
  - X3 = Alokasi Dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara.
  - X4 = nilai faktor aglomerasi.
  - $\alpha_0$  = konstanta.
  - $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  = koefisien masing-masing dari X1, X2, X3
  - t = tahun.
  - i = daerah kabupaten/kota.
  - $\mu$  = faktor gangguan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggambarkan tentang ketimpangan pembangunan ekonomi yang dilihat dari tingkat *Indeks Williamson* di Provinsi Sumatera Utara dan Variabel yang mempengaruhinya meliputi 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data observasi antara tahun 2006 – 2015 yang telah dipublikasikan berasal dari *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara*.

**Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara.**

Berdasarkan Indeks Williamson – yang menunjukkan disparitas pendapatan – maka dapat diketahui terjadinya peningkatan atau ketidaktimpangan pembangunan diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Apabila kita melihat tabel di bawah, maka dapat dijelaskan bahwa banyak daerah di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan nilai Indeks Williamsonnya sepanjang periode 2006 – 2015. Walaupun peningkatan nilai indeks Williamson relative kecil, tetapi hal ini cukup untuk menggambarkan tingginya ketimpangan pendapatan di masyarakat, dimana hal itu juga dapat menggambarkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, walaupun banyak daerah yang juga mengalami penurunan nilai Indeks Williamsonnya.

Pada tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2015 Kota Medan memiliki tingkat Indeks Williamson paling tinggi yakni 0,32478, walaupun demikian hal ini jauh menurun dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 0,521. Disisi lain, Kota Sibolga menjadi daerah yang memiliki Indeks Williamson terendah pada tahun 2015 yakni sebesar 0,00618, dimana nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2006 yakni sebesar 0,0129. Disisi lain juga banyak daerah yang mengalami kenaikan nilai Indeks Williamsonnya, seperti: Kota Tebing Tinggi yang pada tahun 2015 sebesar 0,03509 yang naik tinggi dibanding pada tahun 2006 yakni sebesar 0,0063. Begitu juga dengan Kabupaten Langkat yang pada tahun 2006 memiliki Indeks Williamson sebesar 0,021 naik tinggi menjadi 0,07276 di tahun 2015.

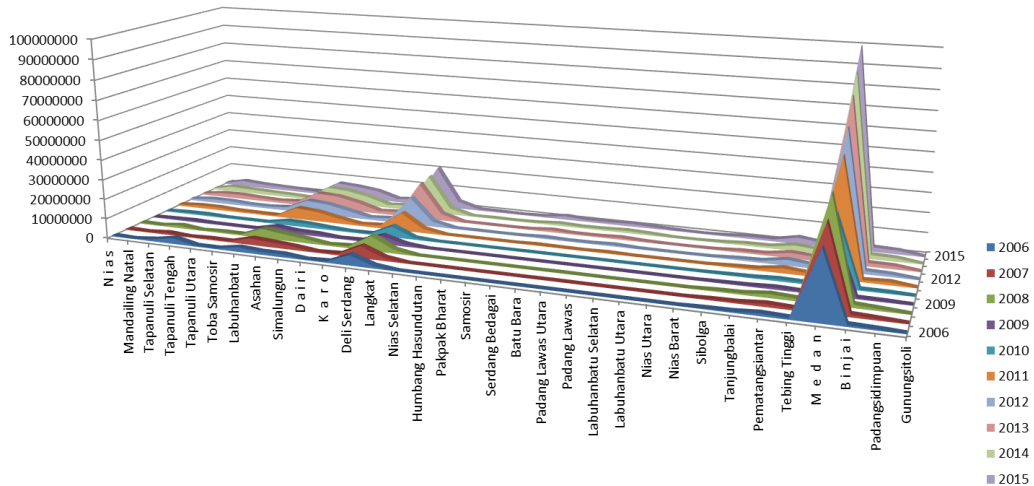
**Tabel Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota menurut Indeks Ketimpangan Williamson Tahun 2006-2015**

NO	Kabupaten /Kota	Indeks Williamson									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten											
1	Nias	0.0713	0.0785	0.0727	0.1595	0.0464	0.05916	0.05277	0.05279	0.05252	0.05157
2	Mandailing Natal	0.0711	0.078	0.0728	0.0704	0.073	0.09923	0.08176	0.08163	0.08148	0.08034
3	Tapanuli Selatan	0.082	0.1002	0.0363	0.037	0.0371	0.06222	0.02481	0.0098	0.01409	0.01467
4	Tapanuli Tengah	0.0719	0.0807	0.0812	0.0815	0.0842	0.10261	0.07389	0.07682	0.07982	0.07966
5	Tapanuli Utara	0.0092	0.021	0.0162	0.0189	0.0226	0.05604	0.07064	0.07187	0.07224	0.07483
6	Toba Samosir	0.0337	0.0229	0.0282	0.0292	0.0265	0.30084	0.02439	0.02636	0.02703	0.02677
7	Labuhanbatu	0.1382	0.1512	0.1461	0.0275	0.0246	0.0281	0.05887	0.05471	0.05124	0.0497
8	Asahan	0.0731	0.0145	0.0284	0.0258	0.0245	0.03483	0.0157	0.01839	0.02002	0.01888
9	Simalungun	0.0343	0.0537	0.0513	0.0493	0.0536	0.10245	0.04802	0.05007	0.05247	0.05388
10	Dairi	0.0021	0.0142	0.0144	0.0155	0.019	0.05019	0.05729	0.05824	0.05841	0.05717
11	Karo	0.0426	0.0234	0.0265	0.0258	0.0297	0.01794	0.00288	0.00451	0.00889	0.00869
12	Deli Serdang	0.1401	0.124	0.14	0.1413	0.141	0.01062	0.03956	0.03533	0.031	0.02982
13	Langkat	0.021	0.0044	0.0201	0.0235	0.0279	0.04368	0.0694	0.07128	0.07421	0.07276
14	Nias Selatan	0.0637	0.0735	0.0738	0.0743	0.0776	0.09726	0.09317	0.09343	0.09395	0.09294
15	Humbang Hasundutan	0.0028	0.0129	0.009	0.0097	0.0123	0.03767	0.04605	0.04657	0.04695	0.04617
16	Pakpak Bharat	0.0232	0.0267	0.0267	0.0265	0.0275	0.03489	0.02981	0.03063	0.0317	0.03177
17	Samosir	0.0011	0.0102	0.0103	0.0101	0.0129	0.03467	0.03797	0.03817	0.03756	0.03589
18	Serdang Bedagai	0.0021	0.0179	0.0047	0.0025	0.0027	0.05004	0.04243	0.04254	0.04215	0.04019
19	Batu Bara	0.295	0.2809	0.3024	0.2953	0.2959	0.18538	0.10662	0.10033	0.09587	0.08761
20	Padang Lawas Utara	0.076	0.064	0.07	0.0696	0.0684	0.08438	0.0239	0.02593	0.02793	0.0275
21	Padang Lawas	0.0732	0.072	0.0721	0.0728	0.0737	0.08779	0.02746	0.02971	0.03324	0.03446
22	Labuhanbatu Selatan	0.0287	0.0292	0.0285	0.0286	0.0288	0.00628	0.08433	0.07898	0.07489	0.07221
23	Labuhanbatu Utara	0.0885	0.0912	0.0875	0.0915	0.0878	0.00204	0.04091	0.03841	0.03497	0.0351
24	Nias Utara	0.043	0.0423	0.0412	0.0432	0.0442	0.05722	0.05381	0.05327	0.05345	0.05309
25	Nias Barat	0.0437	0.0425	0.0435	0.044	0.0439	0.05218	0.04967	0.0494	0.0495	0.04952
Kota/City											
26	Sibolga	0.0129	0.0067	0.0113	0.0113	0.0108	0.01298	0.00129	0.00231	0.00356	0.00618
27	Tanjungbalai	0.0424	0.0295	0.0306	0.0305	0.0293	0.01119	0.01425	0.01499	0.01487	0.01316
28	Pematangsiantar	0.0318	0.0179	0.0214	0.018	0.0136	0.02712	0.00078	0.00124	0.00428	0.00547
29	Tebing Tinggi	0.0063	0.0027	0	0.0003	0.0017	0.02747	0.03682	0.03562	0.03583	0.03509
30	Medan	0.5991	0.521	0.5867	0.5839	0.5888	0.3407	0.30351	0.29878	0.3061	0.32478
31	Binjai	0.0373	0.0247	0.0322	0.0344	0.034	0.00611	0.03073	0.03256	0.03269	0.03059
32	Padangsidempuan	0.0198	0.0295	0.0282	0.0323	0.0388	0.06145	0.05852	0.06089	0.0608	0.05961
33	Gunungsitoli	0.0015	0.0018	0.0021	0.0011	0.0039	0.02425	0.03669	0.03667	0.030361	0.0355

### Investasi Di Provinsi Sumatera Utara.

Semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menerima Penanaman Modal baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri (Asing). Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan yang rutin berhasil mendapatkan investasi dalam jumlah tinggi untuk membangun industri di kedua daerah tersebut. Kabupaten/kota yang lain yang juga cukup rutin menerima penanaman modal adalah Kabupaten Labuhan Batu, Langkat, Asahan, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Kita juga menemukan bahwa ada sejumlah Kabupaten/Kota yang sepanjang tahun 2006 – 2011, tidak pernah menerima penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing. Hal ini menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah daerah, baik itu pemerintahan Provinsi, maupun pemerintahan kabupaten kota yang dengan efektif mempromosikan daerahnya sehingga menjadi menarik bagi para pemilik modal untuk menanamkan modal dan membangun industri di daerah tersebut.

Kota Medan menjadi daerah penerima penanaman modal tertinggi, dengan rata-rata sebesar 58.670.487 (juta Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang yakni sebesar 11.122.433 (juta rupiah), yang unggul jauh bahkan dengan Kabupaten Dairi diperingkat 3 dengan 864.330,4 (juta rupiah), apalagi dengan Kabupaten Nias Utara dengan rata-rata investasi sebesar 3796.3 (juta rupiah). Hal ini juga dapat menjadi alasan mengapa Kota Medan, dan sejumlah Kabupaten yang rutin menerima penanaman modal memiliki keunggulan dalam tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Secara grafik pertumbuhan penanaman modal (investasi) per kabupaten/kota dapat dilihat seperti gambar berikut.



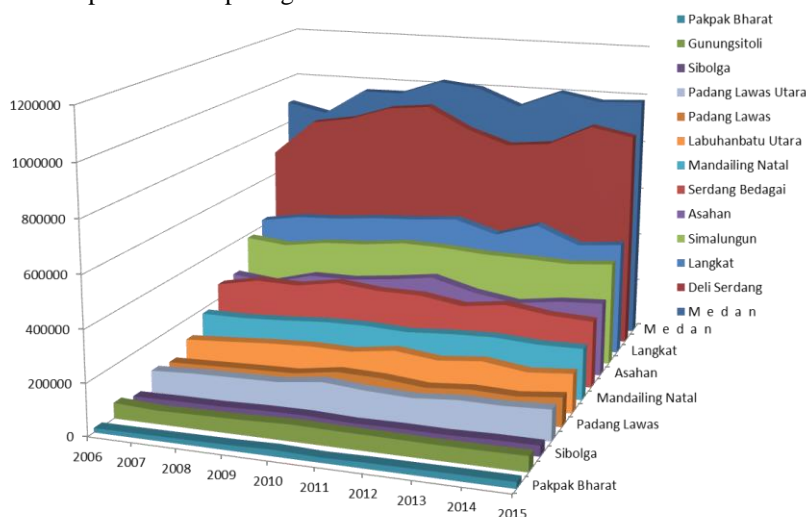
**Gambar Perkembangan Investasi di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2006 – 2015**

**Angka Angkatan Kerja Di Provinsi Sumatera Utara.**

Angkatan kerja, merupakan salah satu modal yang dimiliki oleh daerah dalam menunjang pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa yang produktif. Kota Medan memiliki angka Angkatan Kerja tertinggi untuk tahun 2015 yakni sebesar 984.037 jiwa, yang naik dibandingkan dengan angka angkatan kerja pada tahun 2006 yakni sebesar 889.352 jiwa, diikuti oleh Deli Serdang yang pada tahun 2015 memiliki angka angkatan kerja sebesar 885.897 jiwa, naik tinggi dibanding dengan angkatan kerja tahun 2006 sebesar 694660 jiwa. Tingginya angkatan kerja di Medan dan Deli Serdang, dipengaruhi juga dengan tingginya migrasi angkatan kerja dari daerah lain, mengingat kedua daerah ini telah menjadi daerah industri yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Kabupaten Phakpak Barat menjadi daerah dengan angkatan kerja terkecil jumlahnya untuk tahun 2015 yakni sebesar 24.588 jiwa, namun demikian angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Phakpak barat pada thun 2006 yakni sebesar 17.004 jiwa.

Dari kelompok Kota di Provinsi Sumatera Utara, dari 7 kota yang diteliti, terlihat Kota Sibolga menjadi kota yang terkecil jumlah angkatan kerjanya pada tahun 2015 yakni sebesar 41.055 jiwa, diikuti oleh Kota Gunungsitoli dengan jumlah 59.548 jiwa, serta Kota Tebing Tinggi dengan jumlah 70.362 jiwa. Walaupun demikian angka angkatan kerja di tahun 2015 tetap naik tinggi dibandingkan angka angkatan kerja tahun 2006 dimana Kota Sibolga sejumlah 34.535 jiwa.

Secara umum total angkatan kerja di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan angkatan kerja pada tahun 2006, hal ini sudah tentu sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Secara grafik pertumbuhan angkatan kerja per kabupaten/kota dapat dilihat seperti gambar dibawah.



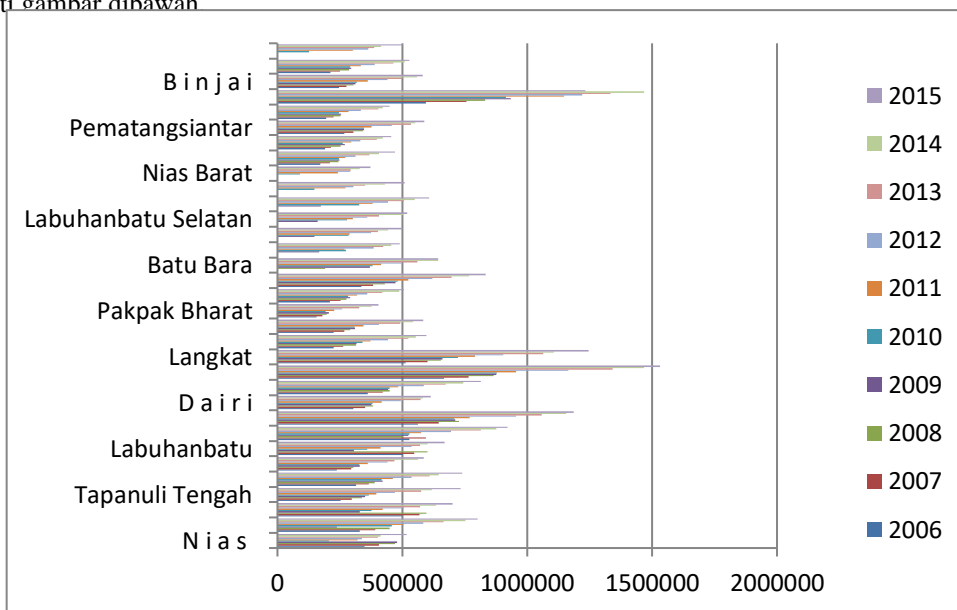
**Gambar Perkembangan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2006 – 2015**

**Alokasi Dana Perimbangan Di Provinsi Sumatera Utara.**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka pemerintah pusat diamanatkan untuk mengalokasikan sejumlah dana di dalam APBN yang diberikan kepada pemerintahan Provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek dan program pemerintah daerah tersebut. Setiap daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi Dana Perimbangan (Dana ALokasi Umum dan dana Alokasi Khusus) yang cukup tinggi. Apabila diperhatikan, dalam 10 tahun ini semenjak dana perimbangan pertama kali diberikan pada tahun 2006, setiap daerah di Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi dana perimbangan yang terus meningkat, bahkan bisa lebih dari 400% kenaikannya.

Pada tahun 2015 Kabupaten Deli Serdang menjadi penerima Dana Alokasi Umu yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain, yakni sebesar 1.396.298 (juta rupiah), diikuti oleh Kota Medan, Kabupaten langkat, dan Kabupaten Simalungun. Kabupaten Nias Barat menjadi penerima Dana Perimbangan yang terendah yakni sebesar 301.538 (juta rupiah).

Semakin tinggi dana perimbangan maka ada potensi suatu daerah akan bertumbuh lebih cepat, dimana dana ini diberikan kepada daerah untuk membiayai sejumlah program di sektor tertentu, seperti pendidikan, infrasturktur, dan pelayanan sosial. Secara grafik pertumbuhan dana perimbangan per kabupaten/kota dapat dilihat seperti gambar dibawah



**Gambar Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sumater Utara Periode Tahun 2006 – 2015**

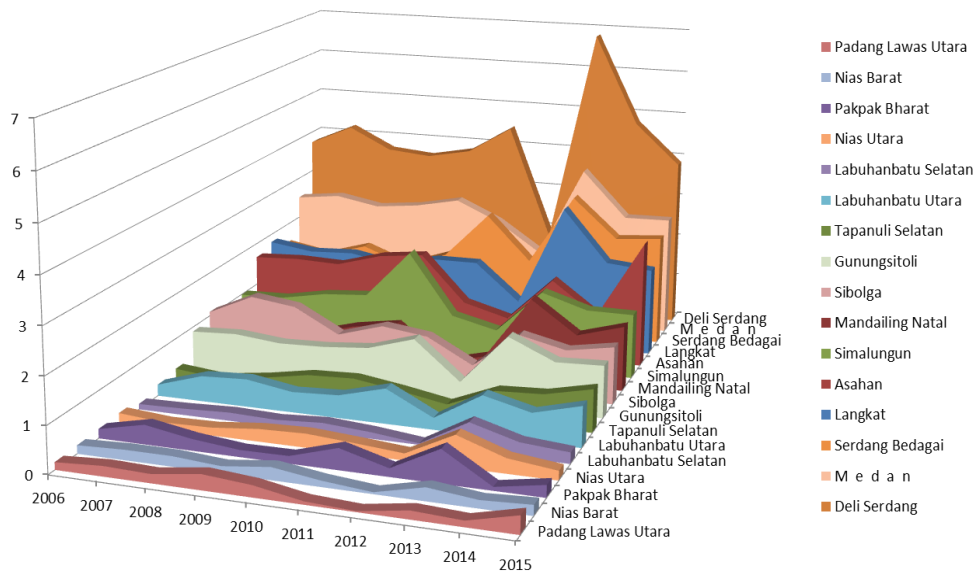
**Tingkat Aglomerasi Di Provinsi Sumatera Utara.**

Dalam pertumbuhan suatu daerah, salah satu bagian yang menjadi perhatian pembangunan adalah upaya untuk membangun pusat pusat industri (aglomerasi) di daerahnya. Pembangunan pusat pusat industri di daerah akan membantu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Dalam hal ini Indeks Balassa yang digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar tingkat aglomerasi di suatu daerah.

Berdasarkan perhitungan Indeks Balassa, sejumlah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara sudah mulai menunjukkan karakteristik daerah yang teraglomerasi. Pada data tahun 2015, Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan angka aglomerasi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Sumatera Utara dengan angka Aglomerasi sebesar 3,86 hal ini juga menggambarkan Deli Serdang telah menjadi daerah industri yang ditunjukan dengan banyaknya pusat pusat industri yang dibangun di daerah Deli Serdang. Diikuti oleh Kota Binjai dengan angka Aglomerasi sebesar 3,25. Disisi lain Kabupaten Nias menjadi daerah dengan nilai Aglomerasi yang terkecil, yakni sebesar 0,17 hal ini juga sesuai dengan kondisi daerah tersebut dimana banyak tenaga kerja yang tidak bekerja di sektor industri manufaktur melainkan bekerja di sektor perikanan.

Secara umum apabila kita memperhatikan Tabel 4.6 diatas, setiap daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, telah bergerak dengan membangun pusat pusat industri di masing masing daerah, hal ini ditunjukan dengan bergerak meningkatnya angka Aglomerasi disetiap daerah tersebut. Secara grafik pertumbuhan aglomerasi per kabupaten/kota dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.





**Gambar Perkembangan Aglomerasi di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2006 – 2015**

**Pengujian Hipotesis pada Masing Masing Variabel Bebas Terhadap Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara**

Pengujian hipotesis pada masing – masing variabel bebas terhadap variabel terkait (Vw) pada penelitian ini dilakukan melalui 2 tahapan yaitu uji signifikansi dengan probability atas p – value dan uji arah atas nilai koefisien.

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai p – value t – stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (  $\alpha = 5\%$  ) variabel Investasi (INV) memiliki p-value t-stat 0.0000, karena nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan Variabel investasi (INV) merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil regresi output data perlakuan atas uji arah ditemukan bahwa hubungan kedua variabel berhubungan negatif sebesar -0.064003. hal ini menjelaskan bahwa apabila Investasi di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 1% maka nilai Ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara akan menurun sebesar 6,4 %.

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai p – value t – stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (  $\alpha = 5\%$  ) variabel Angkatan Kerja (AK) memiliki p-value t-stat 0.0319, karena nilai tersebut  $< 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan Variabel AK merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil regresi output data perlakuan atas uji arah ditemukan bahwa hubungan kedua variabel berhubungan negtif sebesar -0.066963. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Angkatan Kerja (AK) di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 1% maka nilai Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 6,6963 %.

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai p – value t – stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (  $\alpha = 5\%$  ) variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki p-value t-stat 0.2990, karena nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan Variabel DP merupakan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil regresi output data perlakuan atas uji arah ditemukan bahwa hubungan kedua variabel berhubungan positif sebesar 0.017050. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Dana Perimbangan (DP) di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 1 % maka nilai Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara akan Menurun sebesar 1,705 %.

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai p – value t – stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (  $\alpha = 5\%$  ) variabel Aglomerasi (AGL) memiliki p-value t-stat 0.9714, karena nilai tersebut  $> 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan Variabel AGL merupakan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil regresi output data perlakuan atas uji arah ditemukan bahwa hubungan kedua variabel berhubungan negatif sebesar -0.003546. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Aglomerasi (AGL) di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 1 % maka nilai Ketimpangan (VW) di Provinsi Sumatera Utara akan menurun sebesar 0,3546 %.

**Interpretasi Ekonomi.**

Dalam model Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas modal (*capital output ratio*). Daerah yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah, hal ini sudah tentu menarik minat baik itu swasta maupun pemerintah untuk menanamkan modal

/ investasi di setiap daerah untuk membangun industry yang sesuai. Apabila kita memperhatikan koefisien investasi dari hasil pengujian diatas yakni sebesar  $-0.064003$ , hal ini berarti setiap ada kenaikan investasi sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 6,4%. Hal ini menjadi penting diperhatikan bagi setiap pimpinan daerah untuk bagaimana meningkatkan investasi masuk ke daerahnya baik swasta maupun pemerintah, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Angka koefisien Investasi sebesar 6,4% dalam mempengaruhi penurunan ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara juga menjelaskan bagaimana tidak seimbangnyainvestasi yang masuk antar daerah. Dari data yang tersedia bagaimana tingginya rata-rata investasi yang diterima oleh Kota Medan yang menguasai lebih 50% investasi di Provinsi Sumatera Utara, yang diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang. Angka investasi masuk yang kecil di daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah kedepan, kebijakan dalam mempromosikan daerahnya, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun belanja infrastruktur serta kemudahan birokrasi, sangat diperlukan untuk menarik minat investasi bagi daerahnya. Investasi masuk yang cukup tinggi akan membantu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada sisi lain pemerintah daerah juga menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat, pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan proaktif memanfaatkan pertumbuhan tenaga kerja tersebut, dimana pertumbuhan angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu faktor positif yang mamacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Todaro, 2000). Pada penelitian ini didapati koefisien angkatan kerja sebesar  $-0.066963$  yang berarti setiap pertumbuhan jumlah angkatan kerja akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 6,6963%. Dimana hal ini sesuai dengan penelitian Hartono (2008) yakni Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sebagai tesis untuk program pascasarjana Megister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang menemukan bahwa angkatan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan.

Angka signifikansi yang tidak tinggi dari Angkatan Kerja sebesar 6,6963% dalam mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Sumatera Utara, juga dapat menjelaskan bagaimana besarnya angkatan kerja yang terkonsentrasi di Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah daerah penopang disekitarnya seperti Deli Serdang dan Langkat. Migrasi angkatan kerja dari daerah ke Kota Medan dan daerah penopang disekitarnya tidak bisa dinafikan mengingat besarnya akses pendidikan yang tersedia, yang didukung dengan banyaknya pembangunan industri sehingga menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar daripada di daerah, yang secara tidak langsung menawarkan kesejahteraan yang lebih baik.

Namun demikian peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang aktif dari pemerintah. Salah satunya adalah alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Pada penelitian ini kami mendapati koefisien dana perimbangan adalah sebesar  $0.017050$  yang berarti setiap kenaikan dana perimbangan 1 juta rupiah juga memungkinkan dapat menyebabkan kenaikan ketimpangan sebesar 1,7%. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diharapkan karena alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerataan di daerah. Untuk mencari penjelasan dari kondisi ini, perlu juga kita memperhatikan bagaimana pemerintah daerah kabupaten / kota dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya – yang tidak termasuk dalam variable pada penelitian ini. Pada salah satu artikel mengenai peran Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, ditemukan bahwa secara umum Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah, dimana sesuai data dari Direktorat Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah secara nasional rata-rata mencapai 73%, terutama pada daerah daerah marjinal maupun daerah yang baru terbentuk (daerah hasil pemekaran). Dari sana kita juga akan memperhatikan efektifitas dan optimalisasi bagaimana pemerintah daerah mengelola belanja daerah dalam anggarannya. Berdasarkan data yang bersumber dari Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan, ditemukan bahwa sebagean besar belanja daerah yakni sebesar 58% dialokasikan kepada belanja pegawai. Memperhatikan hal ini, daerah yang mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih besar akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi, kondisi berbanding terbalik dengan daerah-daerah marjinal yang tidak menerima transfer dana perimbangan yang cukup besar dan berhasil meningkatkan sumber PAD-nya dari sumber yang lain. Untuk ini pemerintah pusat ditantang untuk melakukan reformulasi kebijakan dana perimbangan setiap tahun-nya sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan terutama bagi daerah-daerah marjinal.

Pada penelitian ini didapati koefisien aglomerasi adalah sebesar  $-0.003546$ , hal ini menunjukkan setiap peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0,3546%. Memperhatikan angka signifikansi yang tidak tinggi dapat dijelaskan dengan angka Aglomerasi yang tinggi dirata-rata Kotamadaya dibandingkan dengan tingkat Aglomerasi yang dimiliki oleh rata-rata Kabupaten, walaupun rata-

rata Aglomerasi Kabupaten Deli Serdang adalah yang tertinggi di Sumatera Utara, tetapi pada peringkat selanjutnya rata-rata Aglomerasi Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar lebih baik daripada kabupaten yang lain di Sumatera Utara, dimana hal ini juga dimungkinkan terjadi memeperhatikan pusat-pusat ekonomi yang bertumbuh terkonsentrasi di kota-kota yang tentu memiliki dukungan dan akses terhadap infrastruktur, angkatan kerja, dan investasi yang lebih besar. Hal lain yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana selama ini pusat-pusat ekonomi banyak dibangun di daerah-daerah penyokong (Outskirt) dari Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membuat formulasi kebijakan kedepan untuk dapat membangun pusat-pusat ekonomi baru yang tersebar dan merata di setiap daerah kabupaten / kota dengan pembangunan pusat idustri yang sesuai dengan karakter ekonomi masing masing daerah. Namun demikian, walaupun dengan angka signifikan yang rendah, tapi tidak dinafikan bahwa aglomerasi memiliki peranan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Investasi memiliki pengaruh sebesar 0.064003 yang berhubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan /indeks williamson di Propinsi Sumatera Utara.
2. Variabel Angkatan Kerja memiliki pengaruh sebesar 0.066963 yang berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan /indeks williamson di Propinsi Sumatera Utara.
3. Variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh sebesar 0.017050 yang berhubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan /indeks williamson di Propinsi Sumatera Utara.
4. Variabel Aglomerasi memiliki pengaruh sebesar 0.003546 yang berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan /indeks williamson di Propinsi Sumatera Utara.

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar perlunya setiap pemerintah daerah kabupaten/kota meningkatkan investasi di daerahnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mengakomodir pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Untuk itu perlu dibangun sejumlah kemudahan kemudahan yang mendukung untuk menarik minat investasi
2. Disarankan agar perlunya setiap pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memamfaatkan alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan kebijakan belanja daerah yang maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Akses transportasi, penerangan, kesehatan dan pendidikan yang layak dan terjangkau sampai kedaerah terpencil akan dapat membantu menekan biaya hidup masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat memiliki dana lebih untuk disimpan maupun investasi. Pengurangan biaya hidup layak dengan efesien akan membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Disarankan agar perlunya pemerintah pusat untuk membangun sentra sentra industri (aglomerasi) di daerah. Pembangunan sentra-sentra industri baru yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik ekonomi lingkungan daerah tersebut akan memberikan peluang kesempatan kerja yang lebih besar agar masyarakat tidak perlu keluar dan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Angkatan kerja yang dimamfaat di industri daerah lokal akan membantu pergerakan ekonomi dan perputaran uang didaerah tersebut sehingga membentuk pusat-pusat ekonomi yang baru, sehingga dapat mencapai pemerataan pendapatan.
4. Disarankan agar perlunya pemerintah daerah membangun infrastruktur yang dapat mendukung pusat pusat ekonomi baru di daerah, sehingga memberikan kemudahan akses bahan baku, tenaga kerja yang kapable dan ahli, maupun jalur distribusi dan pasar.
5. Disarankan agar setiap pemerintah daerah untuk mengeluarkan sejumlah terobosan dalam kebijakan moneter maupun fiskal yang dapat menggerakkan ekonomi serta memberikan efek multiplier pada ekonomi.
6. Disarankan untuk penelitian mengenai ketimpangan antar daerah agar lebih terfokus terhadap peran dari setiap variable pada pengeluaran pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang efektif dan ditujukan pada program yang memberikan efek multiplier ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Ardani, 1992. *Analysis of Regional Growth and Disparity: The impact Analysis of The INPRES Project on Indonesia Development*. Desertasi Doktoral. USA, University of Pennsylvania.

- Anggraeni, Puspa Ratih, 2012. *Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wiayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Repository IPB.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pemabngunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Barika, 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2005 – 2009*. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, volume 4 No. 3.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2016. Pendapatan Regional Sumatera Utara
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2016. Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
- Bank Indonesia, 2016. *Kajian Ekonomi Regional Sumatera Utara*. Jakarta.
- Barro, Robert. J. 1995. *Inflation and Economic Growth*. Paper National Bureu of Economic Research. Amerika Serikat.
- Caska, dan Riyadi, R. M, 2006. *Pertumbuhan dan ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi dari Universitas Riau.
- Ding, Yifan, 2013. *Social and Economic Disparities*. Jounal on Encyclopedia of Life Support System.
- Fitz, Nicholas, 2015. *Economic Inequality: It's Far Whorse Than You Think*. Journal of Scientific American
- Ghaj Glasson, John, 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar, 1995. *Basic Econometrics. Third Edition*, Mcgraw-Hill international edition.
- Gujarati, Damodar dan Down C. Porter, 2009. *Basic Econometrics*, (Fifth Edition), McGraw – Hill. USA
- Halim, 2003. *Pembagian Kriteria Investasi*. Jurnal Makro Ekonomi. Jakarta.
- Harefa, Mandala, 2016. *Implementasi Transfer Dana Perimbangan Dan Implikasinya*. Jurnal DPR Kajian 2016.
- Harrod, Domar, dalam Jhingan. 1975. *Teori Model Model Pertumbuhan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Irawan, dan M. Suparmoko, 1988. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan. Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016. Dana Alokasi Umum. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Kementerian Keuangan. Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016. Dana Alokasi Khusus. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Kiio, Joshua, Neddy Soi, and Kibet Buigut, 2014. *The Impact of Workers remittances On Economic Growth: Evidance from Kenya*. Journal of Economic and Sustainable development, volume 5 No. 26.
- Kuntjoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat, 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Andi.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Ekonomi Makro*, Edisi Keempat, Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mopangga, Herwin, 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Trikonomika, volume 10 No. 1, Juni 2011. Universitas Negeri Gorontalo.
- Nurman, M. Andry, 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia tahun 2001 – 2008*. Jurnal LPPM, volume 9 No. 1. Universitas Terbuka.
- Nurhuda, Rama. M. R. Khairul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo, 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Propinsi Jawa timur tahun 2005 – 2011)*. Jurnal Administrasi Publik, volume 1 No. 4.
- Panji, Putu Barat dan Gusti Bagus Indrajaya, 2016. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume 5, No. 3. Universitas Udayana.

- Sbergami, Federica. 2002. *Agglomeration and Economic Growth: Some Puzzle*. Paper of The Graduate Institut of International Study. Swiss
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Manajemen Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinaga, Handika Cakra P. N. 2010. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.
- Sjafrizal, 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudibya, Bambang dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Aditya Medya.
- Sumitro, Djojohadikusumo, 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, Jakarta : Bagian Penerbitan : LP3ES.
- Sukirno, Sadono, 2007. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Sukirno, Sadono, 1982. *Defenisi dari Pembentukan Modal dan Investasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Sunariyah, 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006. *Pembangunan ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2000. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, Edisi ketujuh diterjemahkan oleh Harris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Thee Kian Wie, 1982. *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Wibisono, Yusuf. 2005. *Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Provinsi di Indonesia, 1984 – 2000*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. o2, Universitas Gajah Mada.
- Winarno, Wing Wahyu, 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yusuf, Muhammad, 2013. *The Gap Analysis of Development between regency or city in the Provence of North Sumatera for the period 2004 – 2008*, Medan. Quantitative Economics Journal, volume 2 No. 2. Universitas Negeri Medan.
- Yunani, Achmad, dan Djoko Mursinto, 2014. *Influence of Government investment and Private investment to Economic growth, Manpower absorption and Amount of Poor population in Regencies/Cities in South Kalimantan Province in 2002 – 2012*. Journal of Economic and Sustainable Development, volume 5 No. 26.
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah>
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan-sumber-pendapatan-daerah-terbesar>